KATALOG : 3205005.31

PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA 2019

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA

PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA 2019

https://jakarta.bps.go.id

PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA, 2019

No. ISSN	: 2714-9234
No. Publikasi	: 31520.2006
Katalog BPS	: 3205005.31
Ukuran Buku	: A5 (14,8cm x 21cm)
Jumlah Halaman	: viii + 61 halaman

Naskah : Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Penyunting : Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Gambar Kulit : Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi DKI Jakarta

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sumber ilustrasi : -

Pencetak: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagianatau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

https://jakarta.bps.go.id

Kata Pengantar

Profil Kemiskinan DKI Jakarta 2019 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, berisi data tentang jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, karakteristik penduduk miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta Tahun 2019. Data-data tersebut merupakan hasil pengolahan dari Survei Susenas Maret dan September 2019.

Publikasi ini menyajikan tabulasi dan grafik tingkat kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta serta tabulasi dan grafik karakteristik penduduk miskin di DKI Jakarta selama tahun 2019.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pengolahan data dan penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Oktober 2020

BPS Provinsi DKI Jakarta
Kepala,

Buyung Airlangga

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar viii

1 Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Penulisan 3

1.3 Ruang Lingkup dan Data yang digunakan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

2 Metodologi 5

2.1 Metode Penghitungan Kemiskinan 5

a. Konsep 5

b. Sumber data 5

c. Metode 5

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan 6

2.2 Indikator Kemiskinan 10

2.3 Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan 12

3 Kemiskinan di Jakarta 21

3.1 Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta, 2012-2019 21

3.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2012-2019 22

https://jakarta.bps.go.id

3.3 Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan 26

4 Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan 30

4.1 Perkembangan Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan 31

4.2 Kriteria Bank Dunia untuk Kemiskinan DKI Jakarta 33

5 Seberapa Dalam Kemiskinan di Jakarta 36

5.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Jakarta 38

5.2 Faktor-faktor yang memengaruhi Kemiskinan secara makro 40

6 Profil Orang Miskin di Jakarta 46

6.1 Karakrteristik Sosial Demografi 46

6.2 Karakteritik Pendidikan 47

6.3 Karakteristik Ketenagakerjaan 49

6.4 Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan) 52

LAMPIRAN 60

DAFTAR TABEL

3.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di DKI Jakarta, September 2018-Maret 2019-September 2019 27

4.1 Gini Ratio di Provinsi DKI Jakarta, 2012-2019 32

5.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta Tahun 2012-2019 39

5.2 KMO and Bartlett's Test 41

5.3 Communalities..... 43

5.4 Total Variance Explained 44

6.1.1 Karakteristik Demografi Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019 47

6.2.1 Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2018-2019 48

6.2.2 Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2018-2019 49

6.3.1 Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019 50

6.3.2 Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019 51
6.4.1 Luas lantai per Kapita menurut Rumah Tangga miskin dan tidak miskin (%), 2018-2019 54
6.4.2 Jenis Atap Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019 55
6.4.3 Jenis Dinding terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019 56
6.4.4 Sumber air minum Rumah Tangga Miskin dan tidak miskin (%), 2018-2019 57
6.4.5 Jenis Jamban Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019 58
6.4.6 Status Kepemilikan Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019 59

https://jakarta.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

3.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta, 2012 – 2019 22

3.2 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta, 2012 – 2019 23

3.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, 2012-2019 24

3.4 Perkembangan GK, GKM, dan GKNM Provinsi DKI Jakarta, 2012-2019 25

3.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di DKI Jakarta, Maret 2012 - September 2019 29

4.1 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk, Maret 2012 – September 2019 35

1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan bukanlah sekedar statistik atau angka semata. Kemiskinan adalah persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan rakyat, masalah hidup dan mati bagi sebagian rakyat yang kurang beruntung. Kemiskinan terjadi salah satunya karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat. Karena itu, masalah kemiskinan harus ditangani secara substantif dan mendasar. Telah banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun faktanya fenomena kemiskinan masih tetap eksis dalam kehidupan manusia dan seakan tidak akan pernah sirna dari kehidupan manusia.

"Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam

memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pada akhirnya, data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka" (BPS, 2008a).

Sejak tahun 2004, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1958/2002 yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nomor 1791/2004 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk memotret wajah kemiskinan dan membantu para pengambil keputusan untuk menentukan langkah yang tepat didalam menanggulangi masalah kemiskinan.

https://jakarta.bps.go.id

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan publikasi ini antara lain untuk:

a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019;

b. Mengetahui karakteristik penduduk miskin di **Provinsi DKI Jakarta tahun 2019;**

c. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan secara regional di Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Karakteristik penduduk miskin dan tidak miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk dan beberapa indikator kemiskinan lainnya juga disajikan dengan menggunakan data Susenas Modul Konsumsi dan Kor pada Maret 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

https://jakarta.bps.go.id

Bab II menjelaskan tentang berbagai penelitian atau metodologi yang pernah dibangun dan disajikan pada publikasi sebelumnya sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan.

Bab III menjelaskan tentang kemiskinan di DKI Jakarta, perkembangan tingkat kemiskinan, perkembangan Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan, perkembangan distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta.

Bab IV menjelaskan tentang Profil Kemiskinan di DKI jakarta, baik pendidikannya, kegiatannya, pengeluaran per kapitanya, penggunaan alat KB, Akses air minum dan fasilitas jamban pada penduduk miskin di DKI Jakarta.

https://jakarta.bps.go.id

2 METODOLOGI

2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

a. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang diksanakan pada bulan Maret.

c. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sebagai berikut:

https://jakarta.bps.go.id

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran).

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

https://jakarta.bps.go.id

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daeah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k didaerah j provinsi

$\overline{HK}_{jp}$ = Harga rata-rata kalori didaerah j provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke-p.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/ sub kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan terhadap total pengeluaran komoditi/ sub kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPDKP 2004,

yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^{n} r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$= Pengeluaran minimun non makanan atau Garis Kemiskinan Non Makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai Pengeluaran per komoditi/ sub kelompok non makanan daerah j dan provinsi p.

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan k menurut daerah (hasil SPDKP 2004) dan daerah j (kota + desa).

k = Jenis komoditi non makanan terpilih.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau pedesaan).

Garis Kemiskinan merupakan Penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan

https://jakarta.bps.go.id

dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{p_p}$$

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin di provinsi p.

PM_p = Jumlah Penduduk Miskin di provinsi p.

P_p = Jumlah Penduduk di provinsi p.

2.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI-P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P_2) yang memberikan gambaran

mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]^\alpha$$

α	=	0,1,2
z	=	Garis Kemiskinan.
y_i	=	Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,...,q), yi < z
q	=	Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
n	=	Jumlah penduduk.

Jika α = 0, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika α = 1 diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan jika α = 2 disebut indeks keparahan kemiskinan (P_2).

https://jakarta.bps.go.id

2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^{b}}$$

A: Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar dari X.

N: Jumlah penduduk total.

b: parameter yang nilainya antara 1 dan 2.

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk terkaya mendapatkan paling banyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini kemudian disebut sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

https://jakarta.bps.go.id

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini dilakukan dengan pendekatan melalui data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks –L.

a. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^{n} fp_i \left(Fc_i + Fc_{i-1} \right)$$

GR = Koefisien Gini.

fp_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i.

fc_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i.

Fc_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendataan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol, maka artinya terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Loenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horisontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal.

Ini menghasilkan kurva lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. garis diagonal mewakili pemetaan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemetaan sempurna, sedangkan jika B=0 kofisien gini bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) salalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata – rata *(mean independence)*. Ini bererti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub kelompok masyarakat (sub group).

- Dapat diuji secara statistik

  Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/ sedang/ menengah.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

c. Indeks Theil dan Indeks- L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famli ukuran

https://jakarta.bps.go.id

ketimpangan *"generalized enthropy"*. Ukuan tersebut secara umum ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha-1)}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right)^{\alpha} - 1\right]$$

Dimana $\bar{y}$ adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yng merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelmpok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- GE(1) disebut sebagai Indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{y_i}{\bar{y}}\right)\ln\left(\frac{\bar{y}}{y_i}\right),$$

- GE (0) juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersbut memberikan standar deviasi dari log (y):

$$GE(0) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln\left(\frac{\bar{y}}{y_i}\right)$$

https://jakarta.bps.go.id

3 KEMISKINAN DI JAKARTA

3.1. Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta , 2012 - 2019

Secara umum, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta masih jauh dibawah angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan nasional baru mencapai mencapai *single digit* pada tahun 2018, namun DKI Jakarta bahkan sudah mencapainya sejak tahun 2012.

Perkembangan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta relatif lebih stagnan jika dibandingkan dengan nasional dengan kisaran 3-4 persen. Menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait profil dan karakteristik orang miskin seperti apa yang mendiami Jakarta serta faktor apa saja yang diduga menyebabkan hal ini masih saja terjadi.

http://jakarta.bps.go.id

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta, 2012 - 2019

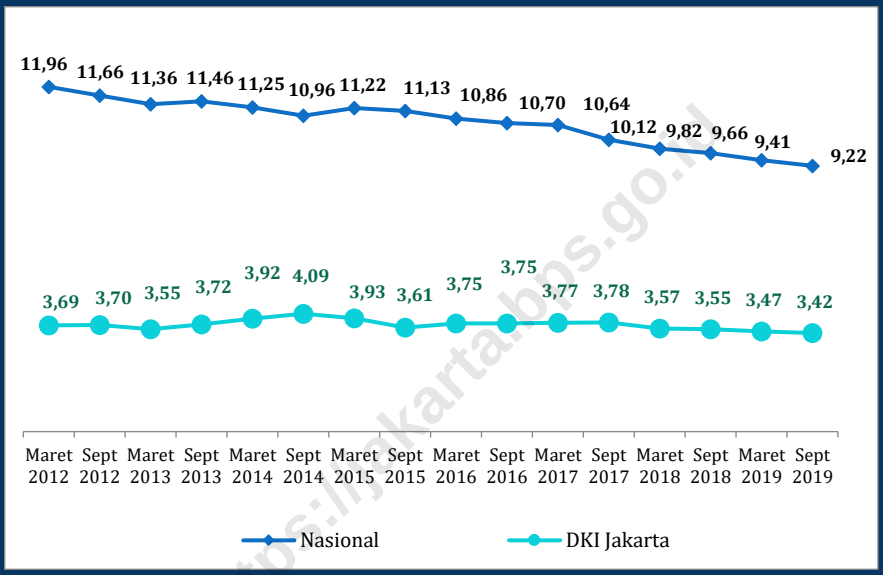

Sumber: Susenas Maret 2012 - September 2019

https://jakarta.bps.go.id

3.2. Perkembangan Tingkat Kemiskinan, 2012-2019

Berdasarkan pantauan Susenas pada kondisi Maret dan September selama tahun 2012-2019, hampir tidak ada perubahan yang relatif signifikan. Dibandingkan kondisi Maret 2012, angka kemiskinan pada September 2019 hanya turun 0,27 persen.

Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2019 mencapai 3,42 persen atau sekitar 362,30 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2019 (3,47% atau 365,55 ribu orang), persentase penduduk miskin turun 0,05 poin atau turun sejumlah ribu orang. Sementara jika dibandingkan kondisi September 2018, persentase penduduk miskin turun sebesar 1,13 poin dari atau sejumlah 9,96 ribu orang.

Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta, 2012 - 2019

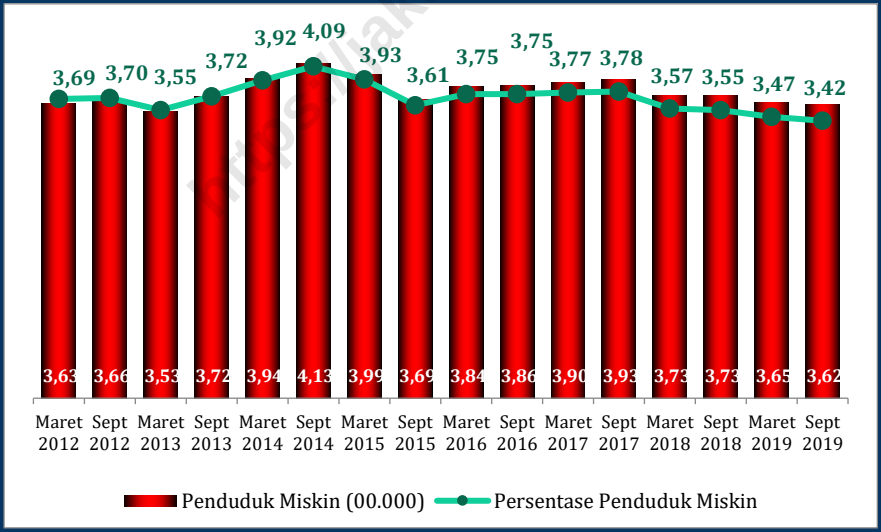

Sumber: Susenas Maret 2012 - September 2019

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dibentuk dari komponen Makanan dan Non Makanan, yang kemudian disebut Garis Kemiskinan Makanan untuk komponen Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan untuk komponen Non Makanan.

Gambar 3.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, 2012 - 2019

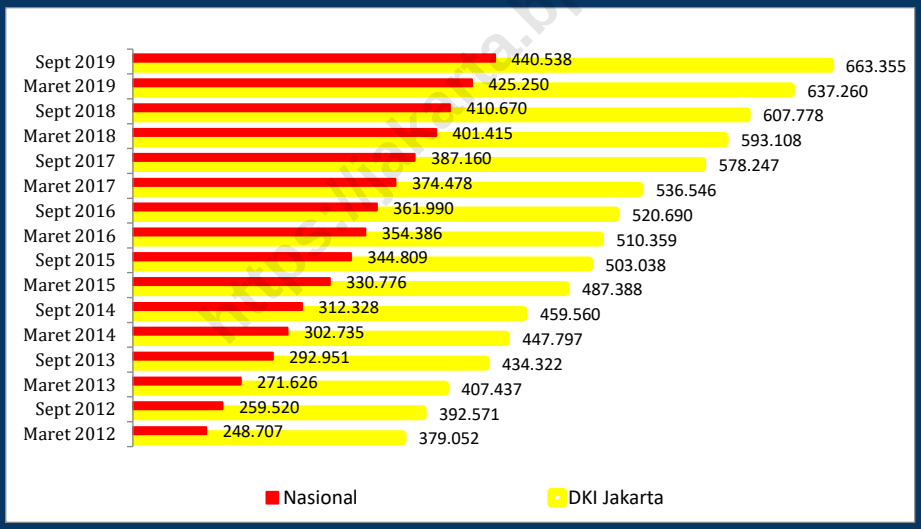

Sumber: Susenas Maret 2012 - September 2019

Selama September 2018 - Maret 2019 - September 2019, Garis Kemiskinan (GK) naik sejalan dengan adanya inflasi. Pada periode Maret 2019 - September 2019, GK naik 4,09 persen dari Rp 663.355 per kapita per bulan menjadi Rp

637.260 per kapita per bulan. Sementara pada periode September 2018 – September 2019, GK naik sebesar 9,14 persen dari Rp 607.778 per kapita per bulan menjadi Rp 663.355 per kapita per bulan.

Gambar 3.4 Perkembangan GK, GKM, dan GKNM Provinsi DKI Jakarta, 2012 - 2019

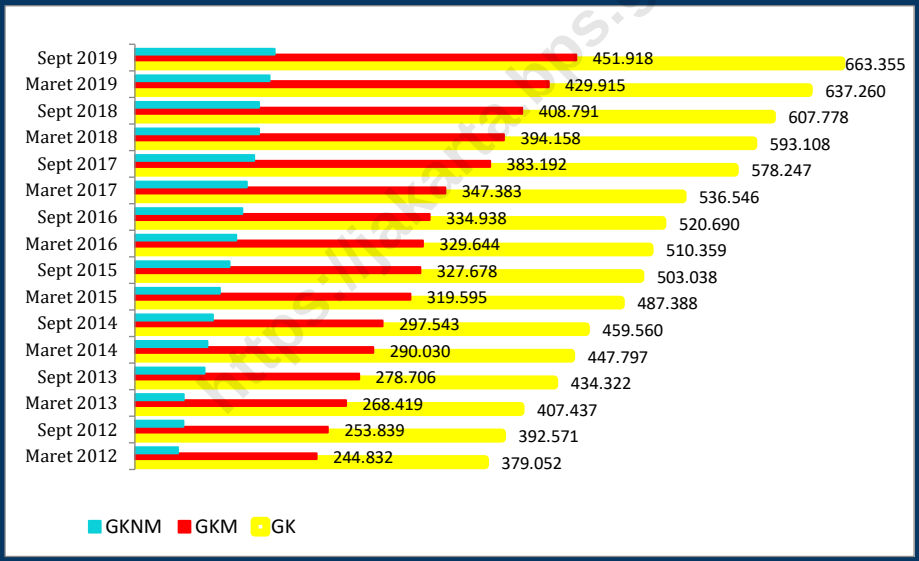

Sumber: Susenas Maret 2012 - September 2019

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan

lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar Non-Makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Kontibusi pengeluaran makanan (GKM) terhadap total keseluruhan pengeluaran konsumsi dalam membentuk Garis Kemiskinan (GK) cenderung lebih tinggi (kisaran 60 persen) dibandingkan kontribusi pengeluaran non makanan (GKMN).

3.3. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 3.1
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di DKI Jakarta,
September 2018 - Maret 2019 - September 2019

Bulan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)
September 2018	0,503	0,107
Maret 2019	0,497	0,111
September 2019	0,397	0,072
Perubahan:		
Maret 2019 - Sept 2019	0,124	0,052
Sept 2018 – Sept 2019	0,179	0,074

Sumber: Susenas September 2018 - September 2019

https://jakarta.bps.go.id

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P_1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity*

Index-P_2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2019 - September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun sebesar 0,1 poin dari 0,497 pada Maret 2019 menjadi 0,397 pada September 2019. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun sebesar 0,039 poin dari 0,111 pada Maret 2019 menjadi 0,072 pada September 2019. Demikian juga jika dibandingkan dengan September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun sebesar 0,106 poin dari 0,503 pada bulan September 2018 menjadi 0,397 pada September 2019. Begitu juga dengan Indeks Keparahan kemiskinan turun sebesar 0,035 poin, yaitu dari 0,107 pada bulan September 2018 menjadi 0,072 pada September 2019.

Gambar 3.5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di DKI Jakarta, Maret 2012 - September 2019

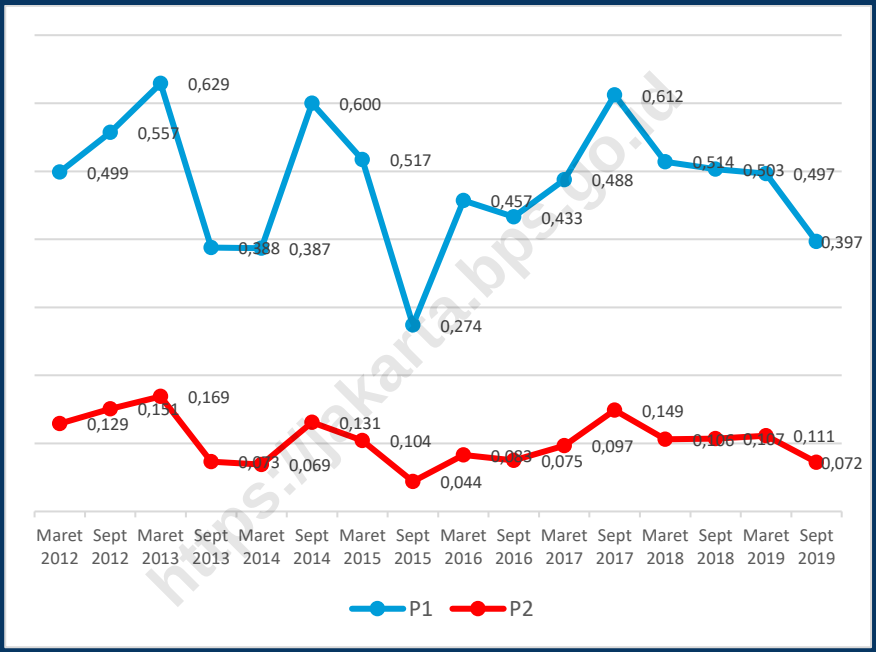

Sumber: Susenas Maret 2012 - September 2019

4 DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Untuk melihat tingkat penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat, dapat digunakan pendekatan melalui distribusi pendapatan. Pengukuran distribusi pendapatan menggunakan dua (2) konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana tingkat pendapatan seorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Sukino, 2013).

Distribusi pendapatan merupakan salah satu indikator pemerataan. Pada dasarnya, pemerataan akan terwujud jika proporsi pendapatan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu sama besarnya dengan proporsi kelompok tersebut. Alat yang lazim digunakan adalah Gini

Ratio dan cara perhitungan yang digunakan oleh Bank Dunia (Hasrimi, 2010).

4.1. Perkembangan Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Gini rasio berada dalam rentang nilai 0 hingga 1, apabila semakin mendekati 1, artinya ketimpangannya semakin besar. Sedangkan nilai 0 menunjukkan ada pemerataan. Gini rasio merupakan indikator hasil perhitungan statistik yang menggambarkan ketimpangan kekayaan masyarakat.

Secara umum angka Gini Rasio pada periode 2012-2019 di DKI Jakarta cenderung mengalami penurunan. Pada periode 2012-2019 terjadi penurunan dari 0,421 pada periode Maret 2012 menjadi 0,391 pada periode September 2019. Angka Gini Rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk. Penurunan angka gini rasio pada periode 2012-2019 mengindikasikan bahwa

https://jakartabps.go.id

distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik (Tabel 2).

Tabel 4.1

Gini Ratio di Provinsi DKI Jakarta, 2012-2019

Periode	Gini Ratio
(1)	(2)
Maret 2012	0,421
September 2012	0,437
Maret 2013	0,433
September 2013	0,404
Maret 2014	0,431
September 2014	0,436
Maret 2015	0,431
September 2015	0,421
Maret 2016	0,411
September 2016	0,397
Maret 2017	0,413
September 2017	0,409
Maret 2018	0,394
September 2018	0,390
Maret 2019	0,394
September 2019	0,391

Sumber: Susenas Maret 2012 – September 2019

Pada periode September 2019 gini ratio di Provinsi DKI Jakarta adalah 0,391, turun sebesar 0,003 poin dari periode Maret 2019. Penurunan gini ratio secara umum

menggambarkan bahwa ketimpangan pengeluaran di masyarakat semakin kecil dari periode Maret 2012 sampai periode September 2019. Selama periode Maret 2012 sampai periode September 2019, gini ratio terendah berada pada periode September 2018 dan gini ratio tertinggi terjadi pada periode September 2014, yaitu sebesar 0,436.

4.2. Kriteria Bank Dunia untuk Kemiskinan Jakarta

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kategori ketimpangan Bank Dunia ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen

https://jakarta.bps.go.id

dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Berdasarkan hasil Susenas September 2019, persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,52 persen yang berarti pendapatan penduduk DKI Jakarta berada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yaitu sebesar 17,30 persen.

https://jakarta.bps.go.id

Gambar 4.1 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk, Maret 2012 – September 2019

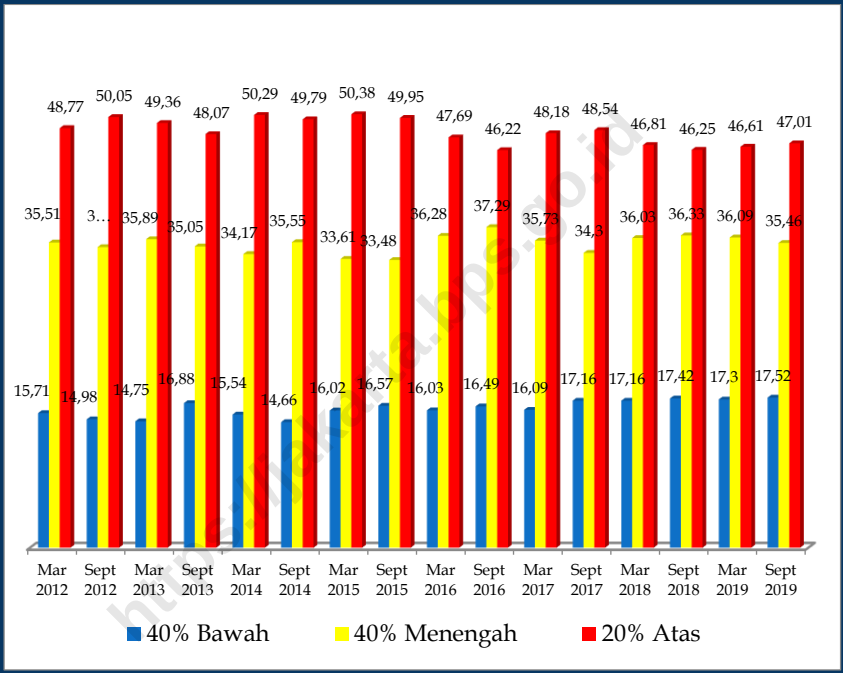

5 SEBERAPA DALAM KEMISKINAN DI JAKARTA?

Pemetaan kemiskinan secara makro bertujuan untuk menggambarkan keragaman kemiskinan dalam suatu wilayah dengan melihat wilayah mana yang lebih sejahtera dan wilayah mana yang kurang sejahtera. Terkadang wilayah yang mempunyai tingkat kemiskinan secara makro yang lebih rendah, mungkin mempunyai kantong-kantong kemiskinan yang besar dan tidak tercermin dalam statistik kemiskinan secara makro.

Pemetaan kemiskinan secara makro dalam publikasi ini didasarkan pada nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1). Alasan menggunakan P1 karena indeks ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin. P1 merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur kemiskinan secara makro, semakin tinggi nilai indeks ini akan menyebabkan rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin semakin besar. Menurut *World Bank Institute* tahun 2002, P1 sebagai

https://jakarta.bps.go.id

biaya mengentaskan kemiskinan karena indikator ini menunjukkan berapa banyak uang yang akan ditransfer kepada penduduk miskin untuk membawa pengeluaran penduduk miskin mencapai garis kemiskinan.

"Strategi kebutuhan dasar (*basic needs*) yang digunakan BPS, sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981:29), dipromosikan dan dipopulerkan oleh *International Labor Organisation* (ILO) pada tahun 1976 dengan judul *Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia*. Strategi kebutuhan dasar memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan tidak langsung, seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down- effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Penentuan masing-masing kebutuhan dasar mengalami kesulitan karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya selera konsumsi

terhadap suatu jenis makanan atau komoditas lainnya" (BPS, 2008a).

5.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Jakarta

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P_1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Pemetaan pada profil kemiskinan setiap kabupaten/kota di DKI Jakarta dilakukan untuk melihat di kabupaten/kota mana penduduk miskin terkonsentrasi. Pemetaan kemiskinan dengan menggunakan nilai P1 provinsi akan menghasilkan 2 kelompok wilayah, yaitu: kelompok kabupaten/kota yang mempunyai nilai P1 di atas nilai P1 provinsi dan kelompok provinsi yang mempunyai nilai P1 di bawah atau sama dengan nilai P1 provinsi.

https://jakarta.bps.go.id

Informasi pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa secara umum dari tahun 2012 sampai tahun 2019, Kabupaten Kepulauan Seribu Kota cenderung mempunya nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Ini sejalan dengan angka besaran persentase

Tabel 5.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta Tahun 2012-2019

Kabupaten /Kota	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kep. Seribu	1,54	0,34	0,69	1,47	0,58	2,09	1,70	1,95
Jakarta Selatan	0,5	0,41	0,60	0,39	0,27	0,38	0,29	0,39
Jakarta Timur	0,4	0,45	0,67	0,50	0,26	0,46	0,36	0,33
Jakarta Pusat	0,6	0,41	0,70	0,24	0,33	0,33	0,77	0,33
Jakarta Barat	0,31	0,52	0,86	0,25	0,45	0,4	0,55	0,46
Jakarta Utara	0,97	0,69	1,04	0,82	0,73	0,83	0,83	0,63
DKI Jakarta	0,56	0,39	0,60	0,52	0,46	0,52	0,51	0,50

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS

https://jakarta.bps.go.id

penduduk miskin (P0) nya. Bahkan nilai P1 Kepulauan Seribu hampir selalu berada diatas rata-rata indeks provinsi kecuali tahun 2013. Sebaliknya Jakarta Selatan hampir selalu berada dibawah rata-rata P1 provinsi kecuali untuk tahun 2013.

Pembahasan disini akan menggunakan analisis deskriptif dan Analisis Komponen Utama (AKU). Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik penduduk miskin dengan menampilkan tabel dan gambar serta interpretasinya. Sementara Analisis Komponen Utama (AKU) digunakan untuk mereduksi variabel dan membentuk faktor utama serta melihat hubungan antara setiap faktor utama dengan P1.

https://jakarta.bps.go.id

5.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan Secara Makro

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan diperoleh dengan cara mereduksi 5 variabel yang telah diidentifikasikan yakni Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Paritas Daya Beli (PPP),

dan Pertumbuhan Ekonomi. Hipotesa yang digunakan dalam pengolahan ini adalah kelima variabel diatas mempengaruhi besaran nilai P0 di Jakarta.

Setelah dilakukan penilaian kelayakan variabel dengan cara menguji hipotesis yang menyatakan bahwa antar variabel asal tidak berkorelasi, langkah berikutnya adalah menguji tingkat kelayakan data untuk mengetahui apakah data dapat dilakukan proses analisis selanjutnya. Berikut hasil pengujian kelayakan apakah data dapat dianalisis lebih lanjut.

Tabel 5.2. *KMO and Bartlett's Test*

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.665
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	17.219
	df	10
	Sig.	.070

Berdasarkan informasi pada Tabel 5.2, diketahui nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) sebesar 0,665 (lebih besar dari 0,50) yang menunjukkan bahwa data

baik untuk dianalisis lebih lanjut dengan AKU maupun analisis faktor. Nilai *Bartlett's Test of Sphericity* sebesar 10 dengan nilai signifikansi 0,000 yang menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan variabel tidak berkorelasi ditolak pada tingkat signifikansi 5%, berarti variabel-variabel tersebut memang berkorelasi.

Langkah selanjutnya, melihat nilai MSA pada setiap variabel yang dianalisis. Nilai MSA ini dapat dilihat pada tabel *anti-image correlation*, nilai MSA ditunjukan pada diagonal *anti-image correlation*. Nilai MSA ini berguna untuk mengetahui apakah sebuah variabel sudah memiliki kecukupan observasi, agar dapat dilanjutkan dengan AKU. Lima variabel yang diteliti mempunyai nilai MSA > 0,50, sehingga 5 variabel tersebut dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Tabel 5.3. *Communalities*

Communalities

	Initial	Extraction
Zscore(AHH) Angka Harapan Hidup	1.000	.944
Zscore(HLS) Harapan Lama Sekolah	1.000	.522
Zscore(RLS) Rata-rata Lama Sekolah	1.000	.944
Zscore(PPP) Paritas Daya Beli	1.000	.604
Zscore(Pert_ekonomi) Pertumbuhan Ekonomi	1.000	.872

Extraction Method: Principal Component Analysis.

https://jakarta.bps.go.id

Berdasarkan informasi tabel *Communalities,* komponen utama yang terbentuk mampu menjelaskan keragaman semua variabel asal dengan porporsi yang cukup besar. Variabel Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mempunyai komunalitas yang paling besar dibandingkan 3 variabel lainnya, yaitu sebesar 0,944. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 94,40% keragaman variabel Angka

Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat dijelaskan oleh Komponen Utama (KU) yang terbentuk. Variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) mempunyai nilai komunalitas terkecil, yaitu sebesar 0,522. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 52,20% keragaman variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dapat dijelaskan oleh KU yang terbentuk.

Tabel 5.4. *Total Variance Explained*

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumu-lative %	Total	% of Variance	Cumu-lative %
1	3.886	77.718	77.718	3.886	77.718	77.718
2	.778	15.552	93.270			
3	.227	4.540	97.810			
4	.094	1.872	99.682			
5	.016	.318	100.000			

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Tabel *Total Variance Explained* menunjukkan jumlah KU yang terbentuk. Lima variabel asal direduksi

menjadi 4 KU. Keempat KU tersebut mampu secara bersama-sama menerangkan persentase keragaman total variabel asal sebesar 77,718%. Menurut Johnson (2002), jumlah KU yang dipilih sudah cukup memadai jika jumlah KU tersebut mempunyai persentase keragaman kumulatif tidak kurang dari 80% total keragaman nilai-nilai dari variabel asal.

Keempat KU yang terbentuk menghasilkan *loading factor* yang sudah tidak berkorelasi satu sama lain dan nilai-nilainya merupakan koefisien korelasi antar variabel asal dengan KU tersebut. Hasil pengolahan yang dihasilkan belum dapat digunakan untuk menentukan variabel asal mana yang masuk ke dalam masing-masing KU.

Variabel-variabel asal yang dominan pada masing-masing KU (selanjutnya disebut faktor utama) dilakukan rotasi pada matriks *loading factor*nya. Proses rotasi pada penelitian ini menggunakan rotasi *varimax*. Variabel asal dominan mempunyai rotasi yang relatif kuat dengan faktor utama yang disusunnya.

6 PROFIL ORANG MISKIN JAKARTA

6.1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan dalam publikasi ini meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Karakteristik tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Berdasarkan tabel 5.2.1 dapat dilihat bahwa baik tahun 2018 maupun tahun 2019. Rumah tangga miskin cenderung memiliki anggota rumah tangga lebih banyak. Pada rumah tangga miskin, rata-rata umur kepala rumah tangga juga lebih tinggu dibandingkan pada rumah tangga yang tidak miskin. Untuk persentase rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan sebagai kepala rumah tangga, jumlahnya cenderung lebih sedikit dibandingkan pada rumah tangga tidak miskin.

https://jakarta.bps.go.id

Tabel 6.1.1
Karakteristik Demografi Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019

Karakteristik Rumah Tangga	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Anggota Rumah Tangga	5,20	3,59	5,26	3,36
Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan	9,76	17,11	9,83	19,31
Rata-Rata Umur Kepala Rumah Tangga	47	47	51	48

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

6.2 Karakteristik Pendidikan

Tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih rendah biasanya akan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk menjadi miskin. Kemampuan baca tulis dan pendidikan terakhir yang ditamatkan menjadi indikator tingkat pendidikan yang dapat diamati pada rumah tangga miskin dan tidak miskin.

Kemampuan baca dan tulis tidak begitu sensitif untuk membedakan rumah tangga miskin atau bukan.

https://jakarta.bps.go.id

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meberantas buta aksara telah membuahkan hasil yang baik di DKI Jakarta. Berdasarkan Tabel 6.2.1 nampak bahwa tidak ada kepala rumah tangga miskin yang buta huruf di DKI Jakarta.

Tabel 6.2.1
Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2018-2019

Kemampuan Baca Tulis	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Huruf Latin	96,35	98.77	100,00	99,92
Huruf Arab	45,15	51.08	55,30	65,28
Huruf Lainnya	6,43	11.50	14,06	12,92
Tidak dapat membaca/menulis	0,60	0,50	0,00	0,07

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

Dari sisi pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan rendah (SMP kebawah) lebih tinggi dibanding rumah tangga tidak miskin (Tabel 6.2.2). Demikian juga untuk pendidikan

https://jakarta.bps.go.id

tinggi, rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya mengenyam pendidikan tinggi di DKI Jakarta persentasinya lebih kecil dibandingkan pada rumah tangga tidak miskin.

Tabel 6.2.2
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin, 2018-2019

Pendidikan	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Tamat SD	5,60	3,83	0,38	3,40
SD	18,04	13,98	12,66	14,69
SLTP	35,36	20,00	20,98	15,15
SLTA	40,65	44,90	46,58	44,56
PT	0,34	17,29	19,40	21,88

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

https://jakarta.bps.go.id

6.3 Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak

miskin adalah lapangan usaha atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga. Dari tabel 6.3.1 dapat dilihat bahwa secara umum lapangan usaha/sektor yang dimasuki kepala rumah tangga miskin tidak jauh berbeda dengan kepala rumah tangga tidak miskin. Hanya saja, pada rumah tangga miskin, hampir sepertiga kepala rumah tangga nya tidak bekerja .

Tabel 6.3.1
Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019

Sumber Penghasilan Utama	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak bekerja	18,01	18,35	31,21	19,97
Industri Pengolahan	11,16	11,40	0,00	2,64
Perdagangan besar dan eceran	15,98	19,14	3,81	13,63
Pengangkutan dan Pergudangan	15,58	10,20	7,81	7,76
Aktivitas jasa lainnya	16,38	11,81	21,60	18,28

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

https://jakarta.bps.go.id

Tabel 6.3.2
Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019

Status Pekerjaan	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak bekerja	18,01	18,35	31,21	19,97
Berusaha sendiri dan berusahan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	26,96	25,16	20,62	24,31
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1,82	2,88	0,06	3,03
Buruh/pegawai/karyawan dan pekerja bebas	53,22	53,25	44,12	48,09
Pekerja keluarga atau tidak dibayar	0,00	0,37	0,07	0,59

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

https://jakarta.bps.go.id

Berdasarkan tabel 6.3.2 dapat dilihat bahwa baik pada rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin, kepala rumah tangga yang bekerja umumnya berstatus buruh/karyawan/pegawai dan paling sedikit yang berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar. ala rumah tangga nya tidak bekerja .

6.4. Karakteristik Tempat Tinggal (Perumahan)

Sudjana (1996) menyatakan rumah sebagai tempat tinggal beserta fasilitasnya harus memenuhi syarat-syarat yang layak untuk mendukung kehidupan dalam rangka pembangunan dari pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pada kenyataannya untuk dapat mewujudkan rumah yang memenuhi syarat tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Indikator perumahan dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga antara lain luas lantai, dinding, sumber air, jamban, dan status pemilikian rumah tempat tinggal.

Penduduk miskin biasanya dikaji dalam unit rumah tangga, bukan dalam unit individu. Kemiskinan juga dianalisis dalam unit rumah tangga. Ada beberapa alasan untuk menganalisis rumah tangga miskin daripada penduduk atau individu miskin. Pertama, kemiskinan pada hakikatnya merupakan cermin keadaan ekonomi rumah tangga. Kedua, apabila ditemukan data rumah tangga miskin maka intervensi terhadap rumah tangga akan lebih efektif

dibandingkan dengan intervensi kemiskinan terhadap individu yang cenderung mengarah pada pandangan bahwa orang miskin memiliki karakteristik sebagai penyebab kemiskinannya

6.4.1 Luas Lantai

Keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal menjadi salah satu indikator perumahan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah perkapita (m^2) Menurut Kementerian Kesehatan,salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah perkapitanya minimal 8 m^2 (BPS, 2001).

Tabel 6.4.1 menunjukkan bahwa masih cukup banyak rumah tangga miskin yang menempati luas lantai per kapita <=8m^2 yaitu sebesar 72,28 persen. Hal ini menunjukkan semakin sempitnya lahan di Jakarta yang digunakan untuk permukiman. Pesatnya pembangunan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan bisnis menggeser keberadaan permukiman dan membuat semakin sempitnya lahan hunian dan harga tanah yang semakin tinggi.

https://jakarta.bps.go.id

Tabel 6.4.1
Luas Lantai per Kapita menurut Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin (%), 2018-2019

Luas Lantai per kapita (m2)	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
≤ 8	77,15	31,50	72,28	33,59
8 < Luas lantai kapita ≤ 15	17,21	26,46	24,01	27,62
> 15	5,21	42,04	3,71	38,79

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

https://jakarta.bps.go.id

6.4.2 Jenis Atap

Jenis atap terluas rumah tangga miskin sebagian besar merupakan asbes, yaitu sebesar 78,14 persen. Sementara rumah tangga miskin yang atapnya dari genteng sebesar 18,02 persen, sisanya adalah lainnya yang sebesar 3,84 persen. Untuk rumah tangga miskin ini, yang dimaksud kategori lainnya adalah seng. Sedangkan untuk rumah tangga tidak miskin, komposisi atap lainnya ini terdiri dari beton, seng, bambu, kayu/sirap, dan lain-lain.

Tabel 6.4.2
Jenis Atap Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019

Jenis Atap Terluas	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Genteng	21,73	40,85	18,02	36,69
Asbes	72,28	53,58	78,14	56,63
Lainnya	5,99	5,58	3,84	6,68

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

https://jakarta.bps.go.id

6.4.3 Jenis Dinding

Berdasarkan jenis dinding terluas, sebesar 88,26 persen rumah tangga miskin dinding rumahnya terbuat dari tembok. Namun, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin yang mencapai 95,64 persen. Sementara rumah tangga miskin yang dindingnya dari kayu/papan masih ada sebesar 10,15 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Jenis dinding lainnya pada rumah tangga miskin hanya terdiri dari

jenis anyaman bambu/kawat, dan nilainya sebesar 1,59 persen.

Tabel 6.4.3
Jenis Dinding Terluas menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019

Jenis Dinding Terluas	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tembok	89,36	94,02	88,26	95,64
Kayu/papan	9,37	5,49	10,15	3,72
Lainnya	1,27	0,49	1,59	0,64

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

https://jakarta.bps.go.id

6.4.4 Sumber air minum

Ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum merupakan indikator perumahan yang mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Ketidaktersediaan air bersih juga menjadi salah satu indikasi kemiskinan. Namun jika dilihat fakta di DKI Jakarta, rumah tangga miskin justru lebih mudah dalam mengakses sumber air minum bersih jika

dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Separuh (54,07 %) rumah tangga miskin menggunakan air isi ulang dan hanya 6,67 persen yang mengkonsumsi air kemasan bernerk untuk memenuhi kebutuhan air. Penggunaan air isi ulang sebagai sumber air minum relatif besar jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

Tabel 6.4.4
Sumber Air Minum Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019

Sumber Air Minum	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Air kemasan bermerk	37,74	38,37	6,67	42,36
Air isi ulang	37,78	37,22	54,07	35,78
Leding	9,54	9,45	17,81	9,51
Sumur bor/pompa	14,73	14,74	20,24	11,82
Sumur terlindung	0,20	0,20	1,06	0,45
Mata air terlindung	0,00	0,00	0,00	0,02
Air hujan	0,02	0,02	0,13	0,02
Lainnya	0,00	0,00	0,02	0,06

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

https://jakarta.bps.go.id

6.4.5 Jenis Jamban

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama/komunal, dan jamban umum/tidak ada. Persentase rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri sebesar 83,31 persen lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin yang sebesar 70,93 persen. Sementara persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban bersama/komunal/jamban umum/tidak ada jamban lebih tinggi dibandingkan pada rumah tangga tidak miskin.

Tabel 6.4.5

Jenis Jamban Rumah Tangga menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019

Jenis Jamban	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jamban Sendiri	64,86	83,60	70,93	83,31
Jamban bersama/komunal	23,45	12,54	24,23	13,90
Jamban Umum/Tidak ada	11,68	3,86	4,85	2,79

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

https://jakarta.bps.go.id

6.4.6 Status Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal

Status pemilikan rumah tempat tinggal dibedakan menjadi rumah sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa, dan lain-lain). Persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri di tahun 2019 sebesar 40,55 persen atau lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang sebesar 47,28 persen.

Tabel 6.4.6
Status Kepemilikan Rumah menurut Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin (%), 2018-2019

Status Kepemilikan Rumah	2018		2019	
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Milik Sendiri	33,67	48,21	40,55	47,28
Kontrak/Sewa	39,17	35,53	27,03	36,58
Lainnya	27,16	16,25	32,42	16,14

Sumber: Susenas Maret 2018-2019

Hanya 27,03 persen rumah tangga miskin yang tinggal dirumah dengan status kepemilikan rumahnya sewa/kontrak, sementara 32,42 persen tinggal di rumah dengan status kepemilikan lainnya.

Lampiran 3. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang ditamatkan, Tahun 2019

No	Kab/Kota	Tingkat Pendidikan		
		< SD	SD-SLTP	SLTA +
1	Kepulauan Seribu	15,61	52,16	29,24
2	Jakarta Selatan	15,38	66,04	15,11
3	Jakarta Timur	0,00	65,60	34,40
4	Jakarta Pusat	0,00	16,38	83,62
5	Jakarta Barat	0,00	23,82	76,18
6	Jakarta Utara	0,00	0,00	100,00
DKI Jakarta		3,18	33,87	61,98

Sumber: Susenas Maret 2019

Lampiran 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2019

No	Kab/Kota	Kerja		
		Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
1	Kepulauan Seribu	44,81	43,65	11,54
2	Jakarta Selatan	61,84	24,02	14,14
3	Jakarta Timur	65,60	00,00	34,40
4	Jakarta Pusat	16,85	0,00	83,15
5	Jakarta Barat	47,74	12,79	39,47
6	Jakarta Utara	58,64	26,91	14,45
DKI Jakarta		36,89	21,24	41,87

Sumber: Susenas Maret 2019

Lampiran 5. Persentase Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Penduduk Miskin, 2019

No	Kab/Kota	Pengeluaran	
		Makanan	Non makanan
1	Kepulauan Seribu	73,13	26,87
2	Jakarta Selatan	61,12	38,88
3	Jakarta Timur	65,84	34,16
4	Jakarta Pusat	67,36	32,64
5	Jakarta Barat	65,43	34,57
6	Jakarta Utara	65,11	34,89
DKI Jakarta		65,79	34,21

Sumber: Susenas Maret 2019

Lampiran 6. Persentase Pengguna Alat KB Penduduk Miskin pada Wanita Usia Subur, 2019

No	Kab/Kota	Persentase	
		Pengguna alat KB	Bukan Pengguna Alat KB
1	Kepulauan Seribu	28,13	20,27
2	Jakarta Selatan	35,68	21,14
3	Jakarta Timur	18,59	62,09
4	Jakarta Pusat	25,17	25,25
5	Jakarta Barat	18,00	49,19
6	Jakarta Utara	18,59	62,09
DKI Jakarta		**26,25**	**25,74**

Sumber: Susenas Maret 2019

https://jakarta.bps.go.id

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

https://jakarta.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA
Jl. Salemba Tengah No 36-38 Paseban Senen Jakarta Pusat, 10440
Telepon: (021) 31928493; Fax: (021) 3152004
Email: bps3100@bps.go.id; Homepage: jakarta.bps.go.id

9 772714 923005